

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(STUDI PERBANDINGAN PADA BANK UMUM SYARIAH
MILIK PEMERINTAH DAN MILIK SWASTA)**

Nurdin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Mir'atun

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

ABSTRACT

Previous studies highlight the relationship between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. Good corporate governance has been found significantly influence the level of a company social responsibility whether in conventional or Islamic companies context. Most of the studies focus of the studies focus on conventional banks or Islamic banks belong to government or private actors. However, limited or even none of the studies has tried to compare the impact of corporate governance on social responsibility between government and private owned syariah banks. Through quantitative method, we studied the differences between government and private owned syariah banks using six syariah banks samples. The sample was purposively selected from Indonesian Bank website. Our data analysis shows that all three variables; independent commissioners, boards of directors, and sharia supervisory boards are significantly impact the companies' corporate social responsibility practices. Eventhough, the difference between government and private owned syariah banks in social responsibility practices is not significant, the result shows that the level compliance of government syariah banks towards social responsibility is higher than private syariah banks. This might prove that government syariah banks might more commit to social welfare than private syariah banks. Future research with more samples and variables might be required to make the finding more valid.

Key words : Corporate governance, corporate social responsibility, syariah banks, comparison

A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)¹ sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena terkait dengan pelaporan keuangan yang transparan (Cohen, Krishnamoorthy, & Wright., 2002). Sejumlah pakar (contohnya: Bonazzi & Islam, 2007; Gibbs, 1993) menganggap munculnya

¹Tata Kelola Perusahaan juga dalam penulisan dialih bahasakan dengan *Good Corporate Governance/GCG*.

corporate governance karena terkait dengan *agency theory* yang memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai *agent* dan pihak pemilik sebagai *principal*. Dalam hal ini pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibandingkan pihak pemilik (prinsipal) (Hisamuddin & Tirta, 2012). Tata kelola perusahaan diatur berdasarkan prinsip adanya pemisahan antara manajemen dan kepemilikan untuk menjaga reputasi dan transparansi (Noe, Rebello, & Rietz, 2015; Sarbah & Xiao, 2015).

Dari perspektif organisasi, *corporate governance* sangat berhubungan dengan kebijakan publik karena hukum, regulasi dan institusi-institusi yang ada merupakan sumber penting bagi pembentukan kerangka normatif tata kelola perusahaan (*corporate governance framework*) (Surya & Yustivandana, 2006). Dalam penelitian ini *corporate governance* (tata kelola perusahaan) diartikan sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi oleh pihak-pihak yang di dalamnya melibatkan dewan direksi, pemegang saham, dan auditor (Tricker, 2015).

Tujuan perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) adalah untuk membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan (Natalylova, 2013). Oleh karena itu, GCG ini sangat diperlukan dalam pengembangan suatu perusahaan agar perusahaan lebih meningkatkan keberhasilan baik dalam perusahaan itu sendiri maupun di masyarakat.

Good corporate governance (GCG) dan *corporate social responsibility* (CSR)² merupakan dua konsep yang tumbuh dan berkembang pada saat yang bersamaan di awal tahun 2000. Konsep GCG dan CSR ini menyangkut kegiatan dunia usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan menjadi perhatian luas di kalangan akademis, praktisi, LSM dan pelaku dunia usaha di dalam maupun di luar negeri. Krisis keuangan yang menimpa beberapa negara memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan sosial, disebabkan rendahnya kepedulian sosial dari perusahaan (Buchholtz, Brown, & Shabana, 2015). Akibatnya munculah gagasan penerapan GCG serta pengungkapan informasi CSR yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan

² Tanggung Jawab Sosial juga dalam penulisan ini dialih bahasakan dengan *Corporate Social Responsibility/CSR*.

yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Priantana & Yustian, 2011).

Kaitan antara GCG dengan CSR sudah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya seperti (Poudel, 2015), (Said, Hj Zainuddin, & Haron, 2009), dan (Furtado, Araújo, & Moreira, 2009). Penelitian mereka lebih berfokus pada bank umum yang prinsip-prinsip pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai komersial dan kapitalisme. Dalam dunia perbankan Islam juga ada sejumlah penelitian (seperti: Riadi, 2013; Sudaryati & Eskadewi, 2012; Abduh & AlAgeely, 2015; dan Allali, 2016) yang mengkaji kaitan antara *corporate governance* perbankan Islam dengan tingkat pengungkapan CSR. Namun penelitian yang membandingkan pengaruh *corporate governance* terhadap CSR antara bank umum syariah milik pemerintah dengan milik swasta belum ada yang melakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pengaruh *corporate governance* terhadap CSR pada dua kelompok bank syariah, yaitu bank umum syariah milik pemerintah dan milik swasta. Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui kelompok bank syariah mana yang lebih tinggi tingkat pengungkapan CSR-nya. Selanjutnya, dapat dibuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih mendorong bank-bank syariah umum yang tingkat CSR nya masih rendah untuk dapat ditingkatkan. Penelitian ini penting dilakukan karena kultur dan kepemilikan kedua kelompok bank tersebut berbeda yaitu bank Islam swasta kepemilikannya oleh masyarakat dan tata kelolanya sepenuhnya independen, sementara itu bank Islam milik pemerintah sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah yang tata kelolanya tentu saja banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah ada perbedaan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah umum milik pemerintah dan swasta?
- b. Apakah dewan komisaris independen, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank syariah umum milik pemerintah dan milik swasta?

3. Manfaat

Manfaat penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) pada bank syariah umum milik pemerintah dan swasta, sehingga ke depan dapat dirumuskan kebijakan terkait tanggung jawab sosial secara lebih baik dan merata demi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable*).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Ada sejumlah penelitian terkait antara tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) baik penelitian di perbankan komersial umum seperti Poudel (2015) dan Khan (2010). Sementara itu, penelitian yang relevan terkait antara *good corporate governance* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah juga sudah pernah dilakukan sebelumnya (Lihat : Abduh & AlAgeely, 2015; Khoirudin, 2013; Sudaryati & Eskadewi, 2012). Namun semua penelitian tersebut belum ada yang membandingkan antara bank syariah umum milik pemerintah dengan milik swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sudaryati dan Yunita Eskadewi (2012) terkait pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di Bank Islam Malaysia Berhad, menemukan bahwa *Islamic governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan proporsi IAH (*Investment Account Holder*) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan kondisi sosial masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa, adanya pengaruh kondisi sosial masyarakat terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* membuktikan bahwa akuntansi bukanlah sebuah ilmu yang *value free*.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Abduh & AlAgeely (2015) di sejumlah bank syariah di Negara Teluk menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dewan independen terhadap tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan data dari laporan tahunan dari 17 bank syariah di negara-negara Teluk mulai tahun 2007 sampai tahun 2011. Namun ukuran perusahaan yang menjadi salah satu variabel dari penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di negara-negara tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amirul Khoirudin (2013) menggunakan seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Penelitian mereka menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

C. TELAAH PUSTAKA

1. Tata Kelola Perusahaan

Ada berbagai penafsiran tentang *coporate governance* (CG) yang telah dikemukakan oleh para ahli. Misalnya Alijoyo (2016) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut:

“Governance refers to check and balance mechanism to assure the best interest of company (firm) is upheld by all decision makers effectively - especially at the board, senior management and (controlling) shareholders - which would become the foundation of all corporate decisions and actions in fulfilling their corporate mission-vision toward triple bottom line objectives (profit/economic value, people/social value, and planet/environmental value).”

Kemudian Setyowati, Zahra, dan Endang (2014) mengatakan bahwa munculnya konsep *good corporate governance* merupakan jawaban terhadap ketidakpuasan para ilmuwan di bidang keuangan atas kinerja teori agensi dalam tataran empirik, bahkan unsur- unsur yang membantu berlakunya *good corporate governance* sendiri tidak lagi berasal dari teori agensi yaitu: pengelola perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemberi

pinjaman, melainkan bertambah lagi terkait dengan informasi, transparansi, *accountability*, dan keterbukaan perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Fauzi dan Suransi (2016) mengatakan bahwa tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan lain dari penerapan GCG yakni, mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, agar dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan.

Manfaat tata kelola perusahaan yang baik menurut Retno dan Priantinah (2012) antara lain perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan modal, dapat menurunkan biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi, dan berdampak baik terhadap harga saham. Keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara terbuka/ transparan.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Keberadaan sebuah perusahaan di tengah masyarakat bukan hanya untuk kepentingan bisnis semata tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya (Ratnadewi & Ulupui, 2016). Setiap perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial, baik yang berhadapan dengan lingkungan organisasi bisnisnya maupun dengan lingkungan masyarakatnya. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Dengan kata lain perusahaan perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atau tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk memengaruhi lingkungannya (Sule & Saefullah, 2005). Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya (Hasibuan, 2007).

Sudana dan Arlindinia (2011) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku

transparan dan etis, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Lebih lanjut Erna dan Sofie (2010) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Ada berbagai alasan bagi sebuah perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya yang menurut Bajra, Arifin, dan Sunatri (2015) antara lain:

- a. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di tengah masyarakat.
- b. Meningkatkan nama baik perusahaan (citra perusahaan), simpati masyarakat, karyawan dan investor, sehingga berharap *feedback* secara ekonomi.
- c. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat.
- d. Meningkatkan respon positif, norma dan nilai masyarakat yang sesuai dengan kehendak investor.
- e. Membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR yakni meningkatkan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan, serta menurunkan biaya operasional (Kamil & Herusetya, 2012).

D. KERANGKA PIKIR & HIPOTESIS

1. Kedudukan Dewan Komisaris Independen

Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 (Bank-Indonesia, 2013) dikatakan bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Tugas dari Dewan Komisaris Independen adalah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi. Sedangkan penelitian terdahulu (misalnya: Khoirudin, 2013; Sudaryati & Eskadewi, 2012) sudah menemukan bahwa GCG terkait erat dengan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah. Untuk itu hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan umum syariah

2. Kedudukan Dewan Direksi

Pengaruh kedudukan Dewan Redaksi terhadap performa sebuah perusahaan sangatlah berat terutama terhadap performa keuangan (Xie, Davidson, & DaDalt, 2003). Orang-orang yang duduk di Dewan Redaksi memiliki kompetensi yang tepat dan integritas yang tinggi dapat mengarahkan sebuah perusahaan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam tata kelola perusahaan yang mencakup adanya mekanisme perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan memastikan mekanisme tersebut dilaksanakan (Buchholtz, et al., 2015).

Dewan Direksi baik secara individual maupun secara kolektif dapat melaksanakan tugas mereka secara efisien dan efektif sehingga manajemen sebuah bank dapat berjalan dengan baik (Charkham, 2003). Dewan Direksi pada bank syariah melakukan fungsi pengawasan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Kesalahan maupun kelalaian Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perseroan harus dipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris bahkan sampai pertanggung jawaban pribadi (Syukron, 2012). Dengan demikian kewajiban bank terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial pun dapat dipenuhi seperti yang diamanatkan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu hipotesis terkait kedudukan Dewan Redaksi dalam pengungkapan tanggung jawab perbankan umum syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Bank syariah menganut nilai-nilai keislaman dalam menjalankan usahanya. Nilai-nilai syariah baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits diimplementasikan dalam prinsip-prinsip usaha mereka. Begitu juga kebijakan terkait *Islamic Social Reporting* dipengaruhi nilai-nilai dalam Al-

Quran seperti dari Al-ur'an surah 2:177, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)...” (Qur'an, 2:177) (Asriati, Ulfah, & Setyorini, 2016). Dengan berfungsinya kedudukan dewan syariah dalam memantau operasional perbankan syariah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga regulasi maka perbankan syariah akan dapat mewujudkan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Dalam hal ini Dewan Syariah memiliki kewenangan untuk menyetujui dan mengesahkan suatu produk bank syariah yang hendak diluncurkan oleh perbankan syariah sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman (Wardhany & Arshad, 2012). Maka, hipotesis untuk variabel kedudukan Dewan Pengawas syariah dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

4. Perbedaan CSR pada Bank Umum Syariah Milik Pemerintah dan Swasta

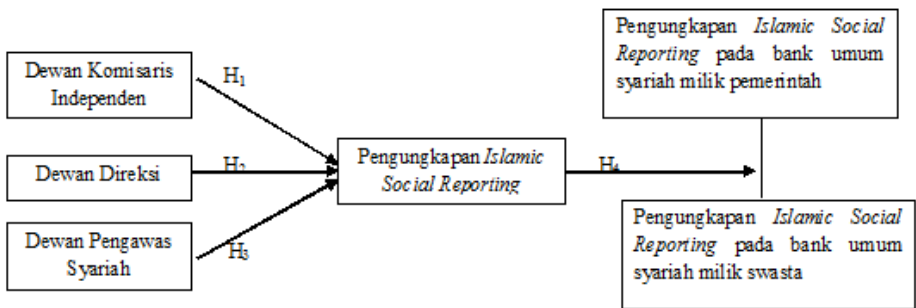
Meskipun belum ada penelitian yang membandingkan antara tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial antara bank umum syariah milik pemerintah dengan swasta, tetapi sudah ada penelitian yang membandingkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial antara bank umum konvensional milik pemerintah dengan milik swasta. Penelitian yang dilakukan oleh Janah (2014) menemukan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank umum komersial milik pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan bank komersial swasta. Rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank komersial milik pemerintah diduga karena bank swasta lebih berekspektasi pada penambahan laba, sedangkan pemerintah berekspektasi untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan mensejahterakan rakyat. Untuk tetap memperoleh laba yang tinggi maka bank swasta harus tetap menjaga kepatuhan pada aturan untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* mereka. Salah satunya yaitu taat terhadap aturan tentang kewajiba pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan.

Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Guo, Sun dan I (2009) pada sejumlah perusahaan milik pemerintah dan milik swasta di Cina menemukan bahwa perusahaan milik pemerintah memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial lebih baik dibandingkan perusahaan swasta. Perbedaan ini bisa jadi karena konteks negara yang berbeda dengan Indonesia yaitu Cina lebih sosialis. Namun perbedaan ini juga bisa menjadi

sumber rujukan dalam merumuskan hipotesis keempat. Maka, itu hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Terdapat perbedaan pengungkapan tanggung Islamic social reporting pada bank syariah umum milik swasta dan pada bank syariah umum milik pemerintah.

Dengan demikian kerangka penelitian ini terdiri dari variabel independen berupa 3 (tiga) proksi yang mewakili tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Selain itu terdapat juga variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki paradigma positivis dimana peneliti percaya bahwa kebenaran (realitas) ada di luar sana dan independen sehingga dapat melahirkan hasil yang objektif seperti Crotty (1998) dan Orlikowski dan Baroudi (1991). Dengan demikian perolehan kebenaran dalam penelitian ini dapat dilakukan tanpa harus berinteraksi langsung. Dengan kata lain data untuk penelitian dapat diperoleh tanpa perlu berinteraksi langsung dengan manusia. Dalam hal ini penelitian akan mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi yang ada di website masing-masing bank dan juga dari situs Bank Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang tercatat sampai dengan tahun 2016 yakni berjumlah 13

(tiga sebelas) Bank Umum Syariah (OJK, 2017). Namun penelitian ini hanya mengambil enam sampel saja yaitu masing-masing 3 dari bank syariah umum milik pemerintah dan 3 milik swasta. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan agar relevan dengan tujuan penelitian, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Usman & Setiady, 2012). Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang terdaftar direktori Bank Indonesia periode 2012-2015.
2. Menerbitkan laporan tahunan periode 2012-2015.
3. Bank umum syariah yang menyertakan komposisi dewan komisaris independen, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah periode 2012-2015.

Bank yang dijadikan sampel terbagi menjadi dua kategori yaitu (i) bank umum syariah milik pemerintah dan (ii) bank umum syariah milik swasta serta melaksanakan CSR. Atas dasar kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 8 (delapan) bank umum syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Central Asia Syariah.

Data primer dalam penelitian ini berupa data laporan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit. Guna memperoleh data primer peneliti melakukan penelusuran yang bisa diakses melalui laporan publikasi Bank Indonesia yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dan laporan tahunan masing-masing bank syariah yaitu pada situs bank syariah umum milik pemerintah dan milik swasta. Data juga diperoleh dari website resmi Bank Indonesia. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara mencari buku-buku literatur yang relevan, melakukan penelusuran jurnal-jurnal nasional dan internasional untuk mendukung penelitian ini khususnya yang menyangkut GCG. Analisa data dilakukan dengan cara analisa konten (*content analysis*) dimana peneliti memungkinkan mengumpulkan data dari berbagai media ekonomi dan menganalisa data-data tersebut untuk melahirkan makna tertentu (Fico, Lacy, & Riffe, 2008).

Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda. Pada penelitian ini digunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengukur hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun simultan. Hal ini bertujuan untuk menerangkan pola hubungan antara variabel-variabel. Adapun rumus regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Selanjutnya, pada penelitian ini juga dilakukan uji beda *t-test* guna mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah umum milik pemerintah dan milik swasta. Uji beda *t-test* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Tujuan dari uji beda *t-test* adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup/ kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup/ kelompok tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer *Statistical Package Social Science (SPSS) version 16.0 for windows*.

F. HASIL & PEMBAHASAN

1. Bank Umum Syariah Milik Pemerintah

a. Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen yaitu *corporate social responsibility* yang diukur dengan ISR. Variabel tersebut akan diuji secara deskriptif seperti berikut ini:

Tabel: Hasil Analisis *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	12	0.5	2.0	1.058	0.5107
Dewan Direksi	12	3.0	8.0	4.917	1.4434

Dewan Pengawas Syariah	12	2.0	3.0	2.333	0.4924
ISR	12	44.0	74.0	59.833	10.4606
Valid N (<i>listwise</i>)	12				

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Nilai rata-rata variabel dewan komisaris independen sebesar 1,058, variabel dewan komisaris independen minimum sebesar 0,5 dan variabel dewan komisaris independen maksimum sebesar 2,0 sedangkan standar deviasi variabel dewan komisaris independen sebesar 0,5107. Sedangkan nilai rata-rata variabel dewan direksi sebesar 4,917, variabel dewan direksi minimum sebesar 3% dan variabel dewan direksi maksimum sebesar 8,0 sedangkan standar deviasi variabel dewan direksi sebesar 1,4434.

Nilai rata-rata variabel dewan pengawas syariah sebesar 2,333, variabel dewan komisaris independen minimum sebesar 2,0 dan variabel dewan pengawas syariah maksimum sebesar 3,0 sedangkan standar deviasi variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,4924. Sedangkan tingkat mean variabel pengungkapan CSR sebesar 59,833, variabel CSR minimum sebesar 44,0, dan variabel CSR maksimum sebesar 74,0 sedangkan standar deviasi variabel dewan komisaris independen sebesar 10,4606. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata bank umum syariah milik pemerintah di Indonesia mengungkapkan sebanyak 30 item dari 50 item pengungkapan CSR.

b. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias. Berikut ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan:

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas (uji *Kolmogorof-Smirnov*) menunjukkan bahwa nilai *asympt. sig* sebesar 0,994, hal ini menunjukkan bahwa nilai *sig* lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan menerima H_o sehingga data residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1, yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas (uji *Glejser*) menunjukkan bahwa tidak satupun variabel independen memiliki nilai *sig* di bawah nilai α (0,05). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,823, setelah dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 12 dan jumlah variabel bebas 3, maka di tabel *Durbin Watson* akan didapatkan nilai 1,864. Oleh karena nilai DW 2,823 lebih besar daripada batas atas (*du*) 1,864 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Secara rinci hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan melihat nilai koefisien regresi pada *model summary*. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau *adjusted R2*. Nilai *adjusted R2* berkisar antara 0 sampai 1, semakin nilai tersebut mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin erat.

Adjusted R2 dihitung dengan cara mengalikan *adjusted R2* dengan 100% (*adjusted R2* x 100%). Berdasarkan hasil analisis, nilai *adjusted R2* sebesar 0,466 atau 46,6%. Nilai *adjusted R2* tersebut berarti menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan ISR adalah 46,6%, sedangkan sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian juga

menunjukkan nilai R atau koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R sebesar 0,816 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Semakin nilai R mendekati 1, maka semakin kuat pula hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

2) Uji F

Dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan terhadap ISR. Semua variabel diuji secara bersama. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Sebaliknya jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau *non fit*.

Pada output ANOVA uji model regresi secara simultan Y ISR diperoleh F hitung sebesar 0,699 dan F tabel dengan (df) $n_1 = 3$ dan $n_2 = 8$ adalah 4,07. F hitung lebih besar dari F tabel ($3,329 < 4,07$) maka secara simultan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada bank umum syariah milik pemerintah. Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai Sig. dengan α . Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Sig. sebesar 0,114 di atas $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *good corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya atau tidak.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel komisaris independen dengan variabel pengungkapan CSR menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -2,844 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan

CSR. Dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris independen akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H_1 “komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” diterima.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel dewan direksi dengan variabel pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,754 dengan nilai signifikansi sebesar 0,485 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah dewan direksi tidak akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H_2 “dewan direksi berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” ditolak.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel dewan pengawas syariah dengan variabel pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,031 dengan nilai signifikansi sebesar 0,350 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah dewan pengawas syariah tidak akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H_3 “Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” ditolak.

2. Bank Umum Syariah Milik Swasta

a. Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen yaitu *corporate social reponsibility* yang diukur dengan ISR. Variabel tersebut telah diuji secara deskriptif, hasilnya sebagai berikut:

Tabel: Hasil Analisis *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	12	0.3	3.0	1.750	1.1008
Dewan Direksi	12	3.0	7.0	4.250	1.2881

Dewan Syariah	Pengawas	12	2.0	3.0	2.667	0.4924
ISR		12	48.0	72.0	58.333	7.1774
Valid N (listwise)		12				

Sumber: Hasil olahan SPSS

Nilai rata-rata variabel dewan komisaris independen sebesar 1,750, nilai minimum sebesar 0,3 dan nilai maksimum sebesar 3,0 sedangkan standar deviasinya sebesar 1,1008. Kemudian, nilai rata-rata variabel dewan direksi sebesar 4,250, nilai minimum sebesar 3,0 dan nilai maksimum sebesar 7,0 sedangkan standar deviasinya sebesar 1,2881.

Nilai rata-rata variabel dewan pengawas syariah sebesar 2,667, nilai minimum sebesar 2,0 dan nilai maksimum sebesar 3,0 sedangkan standar deviasinya sebesar 0,4924. Kemudian tingkat rata-rata variabel pengungkapan CSR sebesar 58,333, nilai minimum sebesar 48,0 dan nilai maksimum sebesar 72,0, sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 7,1774. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata bank umum syariah milik pemerintah di Indonesia mengungkapkan sebanyak 30 item dari 50 item pengungkapan CSR.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ditujukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias. Berikut ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan:

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas (uji *Kolmogorof-Smirnov*) menunjukkan bahwa nilai *asympt.sig* sebesar 0,702, hal ini menunjukkan bahwa nilai *sig* lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan menerima H_0 sehingga data residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1, yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas (uji *Glejser*) menunjukkan bahwa tidak satupun variabel independen memiliki nilai *sig* di bawah nilai α

(0,05). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Nilai DW sebesar 2,405, setelah dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 9 dan jumlah variabel bebas 3, maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai 2,128. Oleh karena nilai DW 2,405 lebih besar daripada batas atas (du) 2,128 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

c. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Secara rinci hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan melihat nilai koefisien regresi pada *model summary*. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau *adjusted R2*. Nilai *adjusted R2* berkisar antara 0 sampai 1, semakin nilai tersebut mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin erat.

Adjusted R2 dihitung dengan cara mengalikan *adjusted R2* dengan 100% (*adjusted R2* x 100%). Berdasarkan hasil analisis, nilai *adjusted R2* sebesar 0,529 atau 52,9%. Nilai *adjusted R2* tersebut berarti menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel *Good Corporate Governance* terhadap variabel Pengungkapan ISR adalah 52,9%, sedangkan sisanya sebesar 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai R atau koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R sebesar 0,840 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Semakin nilai R mendekati 1, maka semakin kuat pula hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

2) Uji F

Dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan terhadap ISR. Semua variabel diuji secara bersama. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Sebaliknya jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau *non fit*.

Pada output ANOVA uji model regresi secara simultan Y ISR diperoleh F hitung sebesar 0,699 dan F tabel dengan (df) $n_1 = 3$ dan $n_2 = 8$ adalah 4,07. F hitung lebih besar dari F tabel ($0,699 > 4,07$) maka H_0 ditolak. Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Sig.* dengan α . Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Sig.* sebesar 0,005 dibawah $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan variabel tanggung jawab sosial perusahaan. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya atau tidak.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel komisaris independen dengan variabel pengungkapan CSR menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -3,988 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan pada variabel pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris independen akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H_1 "Komisaris Independen berpengaruh positif pada Pengungkapan CSR" diterima.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel dewan direksi dengan pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,803 dengan nilai signifikansi sebesar 0,109 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak

signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah dewan direksi tidak akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H_2 “dewan direksi berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” ditolak.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel dewan pengawas syariah dengan variabel pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,577 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H_3 “Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” diterima.

3. Perbandingan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Bank Umum Syariah Milik Pemerintah dan Swasta

Pada hasil analisis Uji *Independent Samples Test*, terlihat bahwa nilai F hitung = 4,107; P = 0,055 karena p adalah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan *varians* pada data pengungkapan ISR bank milik pemerintah dan milik swasta (data homogen). Nilai t hitung = 0,410 (*sig* > 0,05) berarti tidak ada perbedaan dalam pengungkapan ISR baik itu bank milik pemerintah dan milik swasta. Terlihat pula dalam tabel *Group Statistic* bahwa pengungkapan ISR milik pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan milik swasta (59,83 > 58,33), akan tetapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan.

G. SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi komparatif bank umum syariah milik pemerintah dan milik swasta). Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dan uji beda *t-test* hasil pengujian terhadap 6 sampel bank umum syariah milik pemerintah dan milik swasta diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal ini adalah dewan komisaris independen, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik pemerintah dan dewan komisaris

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik swasta.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal ini adalah dewan direksi, berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik pemerintah dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik swasta.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal ini adalah dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik pemerintah sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik swasta.
4. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada bank umum syariah milik pemerintah dan milik swasta terdapat perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak begitu signifikan.

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang antara lain: sampel yang digunakan dalam penelitian hanya terdiri dari 3 (tiga) bank umum syariah milik pemerintah dan 3 (tiga) bank syariah umum milik swasta. Kemudian variabel yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* hanya terdapat 3 (tiga) variabel yakni dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Hal ini karena keterbatasan waktu dan sumberdaya dalam pelaksanaan penelitian.

2. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah umum milik pemerintah dan milik swasta. Oleh karena itu ke depan perlu ada penelitian lain yang melakukan kajian ulang dengan sampel dan variabel yang lebih luas guna pembuktian apakah benar tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial pada kedua kelompok bank tersebut. Meskipun tidak signifikan tetapi ada kecenderungan bank syariah milik pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal ini perlu pembuktian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & AlAgeely, H. A. M. (2015). The impact of corporate governance on CSR disclosure in Islamic banks: empirical evidence from GCC countries *Middle East Journal of Management*, 2(4), 283-295.
- Alijoyo, A. (2016). Defining good Corporate Governance. Retrieved 21 Pebruari 2018, from Wealth and Finance International: <https://www.wealthandfinance-news.com/good-corporate-governance>
- Allali, A. A. (2016). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: The Case of the Moroccan Banks in Italy. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, 4, 11.
- Amri, S., Haryono, A. T., & Warso, M. M. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan PT. Aditec Cakrawiyasa Semarang. *Journal of Management* 2(2).
- Asriati, R., Ulfah, P., & Setyorini, C. T. (2016). *Analisis Perbandingan Komponen Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
- Bajra, B., Arifin, Z., & Sunatri. (2015). Analisis Pengaruh CSR (Corporate Social Responsibility) Terhadap Citra Perusahaan: Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar PT. Adora Indonesia Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 30(1), 189.
- Bank-Indonesia. (2013). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 (pp. 55). Jakarta: Bank Indonesia.
- Bonazzi, L., & Islam, S. M. N. (2007). Agency theory and corporate governance: A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. *Journal of Modelling in Management*, 2(1), 7-23.
- Buchholtz, A. K., Brown, J. A., & Shabana, K. M. (2015). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. In A. Crane, D. Matten, A. McWilliams, J. Moon & D. S. Siegel (Eds.), *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*. London: Oxford University Press.

- Charkham, J. (2003). Guidance for the Directors of Banks. Retrieved 13 Pebruari 2017, from Global Corporate Governance Forum: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd9bc00048a7e730aa6fef6060ad5911/Focus_2_Guidance_for_Directors_of_Banks.pdf?MOD=AJPERES
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright., A. M. (2002). Corporate Governance and the Audit Process*. *Contemporary Accounting Research*, 19(4), 573-594.
- Crotty, M. (1998). *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspectives in the Research Process*. Crows Nest NSW: Allen & Unwin.
- Fauzi, A. S., & Suransi, N. K. (2016). Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(1), 1-19.
- Fico, F. G., Lacy, S., & Riffe, D. (2008). A Content Analysis Guide for Media Economics Scholars. *Journal of Media Economics*, 21(2), 114-130.
- Furtado, T., Araújo, R., & Moreira, R. d. L. (2009). Relationship Between Corporate Governance And Corporate Social Responsibility Disclosure In Brazilian Companies. Paper presented at the XXI Congresso INterbational De Contaduria, Admnistracion E Informatica, Brazil.
- Gibbs, P. A. (1993). Determinants of corporate restructuring: The relative importance of corporate governance, takeover threat, and free cash flow. *Strategic Management Journal*, 14(51), 51-68.
- Guo, J., Sun, L., & L, X. (2009). Corporate Social Responsibility Assessment of Chinese Corporations. *International Journal of Business and Management*, 4(4), 54-57.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hisamuddin, N., & Tirta, M. Y. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109-138.
- Janah, A. (2014). Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta). from Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya:

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188894&val=6467&title=ANALISIS%20PELAKSANAAN%20DAN%20PENGUNGKAPAN%20TANGGUNGJAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20PERBANKAN%20DI%20INDONESIA%20\(Studi%20Komparatif%20Bank%20Pemerintah%20dan%20Bank%20Swasta\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188894&val=6467&title=ANALISIS%20PELAKSANAAN%20DAN%20PENGUNGKAPAN%20TANGGUNGJAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20PERBANKAN%20DI%20INDONESIA%20(Studi%20Komparatif%20Bank%20Pemerintah%20dan%20Bank%20Swasta))

- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 9.
- Kamil, A., & Herusetya, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility. *Media Riset Akuntansi*, 2(1), 1-17.
- Khan, H. U. Z. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management*, 52(2), 82-109.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227-232.
- Natalylova, K. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia Sustainability Reporting Awards. *Media Bisnis, Edisi Khusus November*, 162-182.
- Noe, T. H., Rebello, M. J., & Rietz, T. A. (2015). The Separation of Firm Ownership and Management: A Reputational Perspective. Retrieved 12 February 2017, from Oxford University: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/.../nrrmar2015_2.pdf
- OJK. (2017). *Statistik Perbankan Syariah* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Orlikowski, W. J., & Baroudi, J. J. (1991). Studying Information Technology in Organizations: Research Approaches and Assumptions. [Article]. *Information Systems Research*, 2(1), 1-28.
- Poudel, R. L. (2015). Relationship Between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: Evidence From Nepalese Commercial Banks. *The Journal of Nepalese Business Studies*, 9(1), 137-144.
- Priantana, R. D., & Yustian, A. (2011). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 4(1), 65-78.

- Rahmat, A. (2013). Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Pada Community Development Center PT. Telkom Malang. *Jurnal Skripsi FEB UB*.
- Ratnadewi, P. A., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Mekanisme Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 14(1)*, 548-574.
- Retno, R. D., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Nominal, 1(1)*, 84-103.
- Riadi, I. H. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Corporate Social Responsibility) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Universiats Sebelas Maret, Jember*.
- Roziani, E. A., & Sofie. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *TAZKIA/ Islamic Finance & Business Review, 5(1)*, 61.
- Said, R., Hj Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal, 5(2)*, 212-226.
- Sarbah, A., & Xiao, W. (2015). Good Corporate Governance Structures: A Must for Family Businesses *Journal of Business and Management, 3*, 40-57.
- Setyowati, V. K., Z.A, Z., & Endang, M. G. W. (2014). Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Indeks Bisnis-27 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis, 15(1)*, 1-10.
- Sudana, I. M., & Arlindinia, P. A. (2011). Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan, 4(1)*, 38.

- Sudaryati, D., & Eskadewi, Y. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Bank Syariah *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 14-28.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen* Jakarta: Kencana.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan good corporate governance: mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha* (Vol. 1). Jakarta: Kencana.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 22-41.
- Tricker, B. (2015). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* (3 ed.). London: Oxford University Press.
- Usman, H., & Setiady, P. (2012). *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Wardhany, N., & Arshad, S. (2012). The Role Of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia And Brunei Darussalam. Paper presented at the 2nd ISRA Colloquium.
- Xie, B., Davidson, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*, 9(3), 295-316.